



# LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2020

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DUMAI  
TAHUN ANGGARAN 2021



## **Kata Pengantar**

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas taufiq dan hidayah-Nya, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bappeda Kota Dumai Tahun 2020 ini dapat disusun, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Mekanisme penyampaian LKPJ diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, sesuai pasal 19 ayat 1 disebutkan bahwa LKPJ akhir tahun anggaran disampaikan ke DPRD paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Berdasarkan ketentuan diatas, maka disusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bappeda Kota Dumai. LKPJ merupakan bentuk kewajiban pelaksanaan otonomi daerah dalam rangka menciptakan pemerintah yang bersih, bertanggung jawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik.

Kami berharap semoga laporan ini dapat menjadi dasar untuk melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintah pada tahun-tahun mendatang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta dapat memberi manfaat bagi kita semua.

Dumai, 10 Januari 2021

KEPALA,



MUHAMMAD SYAFIE, S.Sos, M.Si  
Pembina TK.I

NIP. 19650122 199903 1 002

## DAFTAR ISI

|   | Hal |
|---|-----|
| BAB I DASAR HUKUM LKPJ .....  | 1   |
| BAB II PENDAHULUAN .....<br>LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BADAN<br>PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KOTA DUMAI | 3   |
| BAB III PENUTUP .....   | 22  |

**BAB I**  
**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, , Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan dan Kinerja Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kota Dumai Tahun 2005 - 2025;
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Dumai nomor 8 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2016-2021.

**BAB II**  
**P E N D A H U L U A N**  
**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BADAN**  
**PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KOTA DUMAI**

- I. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengacu pada Dokumen Rencana Startegis (RENSTRA) untuk jangka 5 (lima) tahun 2016-2021, terdapat 4 indikator kinerja utama yang telah ditetapkan sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran tersebut sampai tahun 2021. Keempat indikator yang dimaksud antara lain: (1) Tersedianya Dokumen Perencanaan Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan; (2) Proporsi usulan masyarakat yang diakomodir dalam RKPD; (3) Tersedianya Dokumen Perencanaan yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA; dan (4) Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD. Adapun pencapaian masing-masing indikator kinerja utama tersebut pada tahun 2020 dan perbandingannya dengan realisasi kinerja tahun 2019 tersaji pada Tabel 1 sebagai berikut :

Tabel. 1

Capaian Indikator Kinerja Utama pada Tahun 2020  
dan Perbandingan dengan Realisasi Tahun 2019

| INDIKATOR<br>KINERJA SASARAN                          | REALISASI<br>TAHUN 2019 | TARGET<br>AKHIR 2020 | REALISASI<br>TAHUN 2020 |
|---|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| Proporsi usulan masyarakat yang diakomodir dalam RKPD | 37,23%                  | 30%                  | 39,50%                  |
| Tersedianya Dokumen                                   | 2 Dokumen               | 2 Dokumen            | 2 Dokumen               |

|   |       |      |        |
|---|-------|------|--------|
| Perencanaan yang telah ditetapkan dengan PERDA/ PERKADA |       |      |        |
| Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD      | 99,4% | 100% | 96,65% |

Dari data pada tabel diatas dapat dilihat bahwa untuk capaian tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Proporsi usulan masyarakat yang diakomodir dalam RKPD melebihi target yang telah ditetapkan dimana usulan masyarakat telah terakomodir sebanyak 39,50 % dari yang di targetkan 30%.
2. Indikator Tersedianya Dokumen perencanaan yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada, target 2020 adalah tersedianya 2 Dokumen, kedua dokumen tersebut, yakni :
  - a. Dokumen Peraturan Walikota Dumai Nomor 57 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 33 Seri E), dan;
  - b. Peraturan Walikota Dumai Nomor 67 Tahun 2020 tentang Peubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 38 Seri E).
3. Indikator Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD, target 2020 adalah 100%, target ini terealisasi 96,65%. Capaian pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2020 sebagai berikut :
  - Jumlah Program : 16 Program
  - Jumlah Kegiatan : 53 Kegiatan

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Total Pagu               | : Rp. 12.238.222.414,- |
| • Belanja Tidak Langsung | : Rp. 5.887.157.650,-  |
| • Belanja Langsung       | : Rp. 6.351.064.764,-  |

Realisasi Keuangan :

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| • Total Serapan Keuangan         | : Rp. 11.026.807.977,- (90,10%) |
| • Serapan Belanja Tidak Langsung | : Rp.5.212.421.060,- (88,54%)   |
| • Serapan Belanja Langsung       | :Rp. 5.814.386.917,- (91,55%)   |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Total Realisasi Fisik | : 99,80 % |
|-----------------------|-----------|

Realisasi Kegiatan :

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| • Selesai 100 % | : 51 Kegiatan |
| • < 100 %       | : 2 Kegiatan  |

## II. Target dan Realisasi Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam penyelenggaraan Urusan Perencanaan pada Tahun Anggaran 2020, dimana total anggaran untuk 16 (Enam belas) program dan 53 (lima puluh Tiga) kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai adalah Rp. 12.238.222.414,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp. 5.887.157.650,- sedangkan Belanja Langsung sebesar Rp. 6.351.064.764,-. Untuk serapan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 5.212.421.060,- atau 88,54% dan Belanja Langsung terserap Rp. . 5.814.386.917,- atau 91,55%. Adapun realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Tahun Anggaran 2020 disampaikan sebagai berikut:



## **1. Alokasi dan Realisasi Anggaran pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, melalui Kegiatan ;**

- Pada Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat dialokasikan dana sebesar Rp. 2.100.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 2.100.000,- atau 100% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah penyediaan surat menyurat sebanyak 12 Bulan.
- Pada Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dialokasikan dana sebesar Rp. 18.400.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 17.348.850,- atau 94,29% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah pemakaian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebanyak 12 Bulan.
- Pada Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dialokasikan dana sebesar Rp. 41.500.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 23.880.600,- atau 57,54% dengan capaian kinerja 95,18%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah kelengkapan administrasi kendaraan dinas sebanyak 24 Unit.
- Pada Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor dialokasikan dana sebesar Rp. 124.900.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 124.900.000,- atau 100% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor sebanyak 12 Bulan
- Pada Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja dialokasikan dana sebesar Rp. 55.500.000,- dari dana yang

dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 51.174.000,- atau 92,21% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara sebanyak 71 Unit.

- Pada Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor dialokasikan dana sebesar Rp. 161.073.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 160.999.000,- atau 99,95 dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah penyediaan alat tulis kantor sebanyak 12 Bulan.
- Pada Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dialokasikan dana sebesar Rp. 59.747.600,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 47.064.800,- atau 78,77% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan sebanyak 12 Bulan.
- Pada Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dialokasikan dana sebesar Rp. 29.827.731,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 29.827.731,- atau 100% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah penyediaan kebutuhan komponen listrik kantor sebanyak 12 Bulan.
- Pada Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dialokasikan dana sebesar Rp. 30.472.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 28.380.000,- atau 93,13% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah penyediaan

bahan bacaan dan peraturan tentang perundang-undangan sebanyak 12 Bulan.

- Pada Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman dialokasikan dana sebesar Rp. 44.237.500,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 41.762.500,- atau 94,41% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah penyediaan makanan dan minuman tamu, rapat serta kegiatan sebanyak 12 Bulan.
- Pada Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dialokasikan dana sebesar Rp. 368.099.734,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 368.070.400,- atau 99.99% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah sebanyak 12 Bulan.
- Pada Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan Kantor dialokasikan dana sebesar Rp. 128.400.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 127.380.000,- atau 99,21% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah penyediaan jasa keamanan kantor sebanyak 12 Bulan.
- Pada Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran dialokasikan dana sebesar Rp. 562.064.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 562.064.000,- atau 100% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah penyediaan jasa administrasi perkantoran sebanyak 12 Bulan.

## **2. Alokasi dan Realisasi Anggaran pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, melalui Kegiatan ;**

- Pada Kegiatan Pembangunan gedung kantor dialokasikan dana sebesar Rp. 179.670.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 179.668.000,- atau 100% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah gedung kantor yang dibangun sebanyak 2 unit.
- Pada Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor dialokasikan dana sebesar Rp. 144.026.800,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 142.926.800,- atau 99,24% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor sebanyak 6 Unit.
- Pada Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor dialokasikan dana sebesar Rp. 199.348.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 154.350.700,- atau 77,43% dengan capaian kinerja 94,48%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor sebanyak 14 Unit.
- Pada Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dialokasikan dana sebesar Rp. 413.691.983,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 413.584.800,- atau 99,97% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara secara rutin/berkala sebanyak 24 Kendaraan.

- Pada Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor dialokasikan dana sebesar Rp. 198.560.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 198.559.000,- atau 100% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah gedung/kantor yang direhabilitasi sebanyak 2 Unit.

### **3. Alokasi dan Realisasi Anggaran pada Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, melalui Kegiatan ;**

- Pada Kegiatan Pembinaan mental dan fisik aparatur dialokasikan dana sebesar Rp. 57.400.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 27.805.000,- atau 48,44% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah pembinaan jasmani dan rohani sebanyak 12 Bulan.

### **4. Alokasi dan Realisasi Anggaran pada Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, melalui Kegiatan ;**

- Pada Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dialokasikan dana sebesar Rp. 17.100.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 17.100.000,- atau 100% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD sebanyak 3 Dokumen.
- Pada Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun dialokasikan dana sebesar Rp. 1.800.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 900.000,- atau 50%



dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah dokumen laporan keuangan sebanyak 2 Dokumen.

**5. Alokasi dan Realisasi Anggaran pada Program Pengembangan Data/ Informasi, melalui Kegiatan ;**

- Pada Kegiatan Sistem Informasi Perencanaan Daerah dialokasikan dana sebesar Rp. 106.929.000,- dari dana yang telah dialokasikan dapat direalisasikan sebesar Rp. 84.126.750,- atau 78,68% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah aplikasi yang digunakan sebanyak 2 Aplikasi.
- Pada Kegiatan Penyusunan Data Perencanaan Daerah dialokasikan dana sebesar Rp. 60.000.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 50.860.000,- atau 84,77% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah laporan data inputan E-Database SIPD Kemendagri sebanyak 1 Laporan.

**6. Alokasi dan Realisasi Anggaran pada Program Pengembangan Perumahan, melalui Kegiatan ;**

- Pada Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan dialokasikan dana sebesar Rp. 329.867.150,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 323.417.201, atau 98,04% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah dokumen tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh Kota Dumai sebanyak 1 Dokumen.

**7. Alokasi dan Realisasi Anggaran pada Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan, melalui Kegiatan ;**

- Pada Kegiatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dialokasikan dana sebesar Rp. 295.422.050,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 278.311.516,- atau 94,21% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah dokumen penanggulangan kemiskinan sebanyak 1 Dokumen.

**8. Alokasi dan Realisasi Anggaran pada Program Kerjasama Pembangunan, melalui Kegiatan ;**

- Pada Kegiatan Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah dialokasikan dana sebesar Rp. 100.000.000,- dari dana yang telah dialokasikan dapat direalisasikan sebesar Rp. 79.440.873,- atau 79,44% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah koordinasi yang dilaksanakan dalam rangka perencanaan pembangunan daerah sebanyak 12 Bulan.

**9. Alokasi dan Realisasi Anggaran pada Program Pengembangan Wilayah Perbatasan, melalui Kegiatan ;**

- Pada Kegiatan koordinasi penetapan rencana tata ruang perbatasan dialokasikan dana sebesar Rp. 90.882.425,- dari dana yang telah dialokasikan dapat direalisasikan sebesar Rp. 90.158.200,- atau 99,20% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Dokumen usulan program dan kegiatan rencana tata ruang perbatasan ke BPPD Provinsi Riau dan BNPP Pusat sebanyak 1 Dokumen.

## **10. Alokasi dan Realisasi Anggaran pada Program Perencanaan Pengembangan kota-kota menengah dan besar, melalui Kegiatan ;**

- Pada Kegiatan Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan dialokasikan dana sebesar Rp. 73.324.600,- dari dana yang telah dialokasikan dapat direalisasikan sebesar Rp. 72.858.709,- atau 99,36% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah koordinasi terkait penyelesaian dan perencanaan infrastruktur transportasi sebanyak 10 Kali.
- Pada Kegiatan Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dialokasikan dana sebesar Rp. 62.124.900,- dari dana yang telah dialokasikan dapat direalisasikan sebesar Rp. 53.665.982,- atau 86,38% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah koordinasi terkait perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi sebanyak 12 bulan.
- Pada Kegiatan Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat industri dialokasikan dana sebesar Rp. 100.528.069,- dari dana yang telah dialokasikan dapat direalisasikan sebesar Rp. 83.739.943,- atau 83,3% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah dokumen perencanaan penanganan pusat-pusat industri sebanyak 1 dokumen
- Pada Kegiatan Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan dialokasikan dana sebesar Rp. 260.927.412,- dari dana yang telah dialokasikan dapat direalisasikan sebesar Rp. 249.234.212,- atau 95,52% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah dokumen

perencanaan akses air bersih/air minum dan sanitasi yang di Kota Dumai sebanyak 1 Dokumen.

- Pada Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan dialokasikan dana sebesar Rp. 88.416.250,- dari dana yang telah dialokasikan dapat direalisasikan sebesar Rp. 84.716.250,- atau 95,82% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi perencanaan fisik, sarana dan prasarana sebanyak 1 Dokumen.
- Pada Kegiatan Koordinasi perencanaan Penanganan Infrastruktur dialokasikan dana sebesar Rp. 91.050.000,- dari dana yang telah dialokasikan dapat direalisasikan sebesar Rp. 88.210.693,- atau 96,88% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah koordinasi perencanaan penanganan infrastruktur sebanyak 10 Kali.

#### **11. Alokasi dan Realisasi Anggaran pada Program Perencanaan Pembangunan daerah, melalui Kegiatan ;**

- Pada Kegiatan Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik dialokasikan dana sebesar Rp. 121.975.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 85.010.000,- atau 69,69% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah forum OPD yang dilaksanakan sebanyak 1 Forum.
- Pada Kegiatan Penyusunan rancangan RPJMD dialokasikan dana sebesar Rp. 167.350.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 62.993.200,- atau 37,64% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Dokumen RPJMD sebanyak 1 Dokumen.

- Pada Kegiatan Penyusunan rancangan RKPD dialokasikan dana sebesar Rp. 210.550.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 154.520.700,- atau 73,39% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Dokumen RKPD dan dokumen perubahan RKPD yang disusun sebanyak 2 Dokumen.
- Pada Kegiatan Penyelenggaraan musrenbang RKPD dialokasikan dana sebesar Rp. 145.580.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 123.005.000,- atau 84,49% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Musrenbang RKPD yang dilaksanakan, keikutsertaan Pra dan Pasca Musrenbang Provinsi Riau, keikutsertaan Musrenbang tingkat Nasional sebanyak 3 Kali.
- Pada Kegiatan Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah dialokasikan dana sebesar Rp. 71.976.879,- dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 69.526.879,- atau 96,6% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Dokumen LKjIP yang disusun tepat waktu sebanyak 1 Dokumen.
- Pada Kegiatan Koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) dialokasikan dana sebesar Rp. 65.500.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 60.000.000,- atau 91,6% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah dokumen LKPJ yang disampaikan tepat waktu sebanyak 1 Dokumen.
- Pada Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan pelaporan dialokasikan dana sebesar Rp. 61.800.000,- dari dana yang dialokasikan



dapat direalisasikan Rp. 46.100.000,- atau 74,6% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah dokumen evaluasi RKPD sebanyak 4 Dokumen.

- Pada Kegiatan Penyusunan dan evaluasi perencanaan aksi daerah sustainable development goals dialokasikan dana sebesar Rp. 82.195.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 75.526.900,- atau 91,89% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi SDG-s sebanyak 1 Dokumen.
- Pada Kegiatan Pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) dialokasikan dana sebesar Rp. 106.750.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 100.750.000,- atau 94,38% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah dokumen pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) sebanyak 1 Dokumen.
- Pada Kegiatan Pemantauan dan evaluasi Dana Alokasi Khusus dialokasikan dana sebesar Rp. 140.000.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 120.475.100,- atau 86,05% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi Dana Alokasi Khusus sebanyak 1 Dokumen.
- Pada Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kelurahan dialokasikan dana sebesar Rp. 54.650.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 46.899.400,- atau 85,82% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja

keluaran adalah Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan kelurahan sebanyak 1 Dokumen.

**12. Alokasi dan Realisasi Anggaran pada Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, melalui Kegiatan ;**

- Pada Kegiatan Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi dialokasikan dana sebesar Rp. 99.022.481,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 94.065.370,- atau 95,01% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi sebanyak 1 Dokumen.

**13. Alokasi dan Realisasi Anggaran pada Program perencanaan sosial budaya, melalui Kegiatan ;**

- Pada Kegiatan Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya dialokasikan dana sebesar Rp. 68.400.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 66.786.700,- atau 97,64% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya sebanyak 1 Dokumen.
- Pada Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan dialokasikan dana sebesar Rp. 40.050.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 37.580.000,- atau 93,83% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi perencanaan sosial budaya sebanyak 1 Dokumen.
- Pada Kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan SDM dialokasikan dana sebesar Rp.

98.840.200,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 96.222.400,- atau 97,35% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan SDM sebanyak 1 Dokumen.

- Pada Kegiatan Koordinasi perencanaan pembangunan bidang aparatur Pemerintahan dialokasikan dana sebesar Rp. 71.284.500,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 70.523.400,- atau 98,93% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang aparatur sebanyak 1 Dokumen.

**14. Alokasi dan Realisasi Anggaran pada Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, melalui Kegiatan;**

- Pada Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah dialokasikan dana sebesar Rp. 30.000.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 29.200.000,- atau 97,33% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah persentase aset milik perangkat daerah yang dikelola dengan baik sebanyak 90%.

**15. Alokasi dan Realisasi Anggaran pada Program Perencanaan Tata Ruang, melalui Kegiatan ;**

- Pada Rapat Koordinasi tentang Rencana Tata Ruang di alokasikan dana sebesar Rp. 100.473.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan sebesar Rp. 99.317.858,- atau

98,85% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah koordinasi tentang rencana tata ruang sebanyak 15 Kali.

- Pada Kegiatan Survey dan Pemetaan dialokasikan dana sebesar Rp. 76.160.500,- dari dana yang telah dialokasikan dapat direalisasikan sebesar Rp. 76.160.500,- atau 100% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah dokumen survey dan pemetaan data-data spasial permukiman sebanyak 1 Dokumen.

**16. Alokasi dan Realisasi Anggaran pada Program Pemanfaatan Ruang, melalui Kegiatan;**

- Pada Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan tata ruang di alokasikan dana sebesar Rp. 41.137.000,- dari dana yang dialkokasikan dapat direalisasikan sebesar Rp. 41.137.000,- atau 100% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi pelaporan terhadap pemanfaatan ruang sesuai RTRW Kota Dumai sebanyak 1 dokumen.

### **BAB III**

### **PENUTUP**

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran yang telah digunakan untuk biaya pelaksanaan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun 2020, secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam penyelenggaraan Urusan Perencanaan pada Tahun Anggaran 2020, dimana total anggaran untuk 16 (enam belas) program dan 53 (lima puluh tiga) kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai adalah Rp. 12.238.222.414- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp. 5.887.157.650,- sedangkan Belanja Langsung sebesar Rp. 6.351.064.764,-. Untuk serapan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 5.212.421.060,- atau 88,54% dan Belanja Langsung terserap Rp. 5.814.386.917,- atau 91,55%.
- b. Bahwa Laporan Pertanggungjawaban Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai tahun 2020 menjadi masukan terhadap penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kota Dumai tahun 2020.


Tidak tercapainya penyerapan anggaran pada Tahun Anggaran 2020 antara lain disebabkan adanya efisiensi kegiatan dan pertimbangan waktu yang tidak mencukupi untuk menghasilkan output apabila kegiatan tetap dilaksanakan. Solusi upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan pada tahun 2021, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Dumai akan lebih cermat dalam menyusun target-target capaian Output



dan Outcome sebagaimana target dalam Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kota Dumai.

Dumai, Januari 2021

Kepala,



MUHAMMAD SYAFIE, S.Sos.  
M.Si

Pembina TK.I  
NIP. 19650122 199903 1 002



Jalan Tuanku Tambusai, Kel. Bagan Besar,  
Kec. Bukit Kapur, Kota Dumai, Riau